

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sesuai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari hasil Pembahasan mengenai Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa dokumen-dokumen yang terdapat dalam setiap tahapan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai dan belum lengkap.
2. Dari hasil penelitian di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa pada tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa, namun hasil analisis untuk tahun 2015 dan tahun 2016 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Dari hasil Pembahasan diketahui bahwa tidak adanya dokumen-dokumen buku kas pembantu kegiatan dan surat permintaan pembayaran yang seharusnya dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan, tidak adanya buku kas pembantu pajak dan buku bank desa yang harus dicatat atau dibukukan oleh Bendahara Desa Poto.

4. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Hasil penelitian di ketahui bahwa pada tahap perencanaan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan kemasyarakatan tidak terlalu banyak dianggarkan, dan pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa prosedur yang dilanggar dan tidak di dukung oleh dokumen yang lengkap. Hasil penelitian di ketahui bahwa realisasi sebagian pengeluarannya tidak didukung dengan bukti pelaksanaan yang akurat, dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban belanja pelaksana kegiatan.
5. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan di Desa Poto belum terlaksana dengan baik karena kurang maksimalnya pengelolaan ADD yang dipengaruhi beberapa kendala, yaitu minimnya kualitas sumber daya Aparat Desa Poto dalam beberapa hal terbatasnya pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilakukan, kurangnya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan program dalam pengelolaan ADD.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka disarankan kepada pemegang kuasa pengelolaan keuangan tingkat desa dalam hal ini Kepala Desa serta perangkat Desa Poto sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Pemerintah Desa Poto dalam tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggunggunjawaban Alokasi Dana Desa harus menyiapkan dokumen-dokumen buku kas

pembantu kegiatan dan surat permintaan pembayaran yang seharusnya dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan.

2. Diharapkan agar Pemerintah Desa Poto melengkapi dokumen-dokumen pencatatan khususnya buku kas pembantu kegiatan, surat permintaan pembayaran, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa serta laporan kekayaan milik desa.
3. Diharapkan agar Pemerintah Desa Poto melengkapi proses pencatatan buku kas umum, Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sehingga data laporan akhir dapat diandalkan dan dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.
- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (Disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah)*. Jakarta
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, Sudarno dkk. 2016. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Jurnal Akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- DPMD, Pemerintah Kabupaten Kupang. 2014. *Rekapan Penetapan Besaran Dana Transfer Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014*. Oelamasi.
- DPMD, Pemerintah Kabupaten Kupang. 2015. *Rekapan Penetapan Besaran Dana Transfer Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015*. Oelamasi.
- DPMD, Pemerintah Kabupaten Kupang. 2016. *Rekapan Penetapan Besaran Dana Transfer Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016*. Oelamasi.
- BPKP. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta
- Kupang, Pemerintah Kabupaten. 2016. *Kabupaten Kupang Dalam Angka tahun 2016*. Oelamasi.
- Leba, Elkana Goro. 2013. *Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang*. Jurnal. Universitas Gadjah Mada Yoyakarta.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga.

Republik Indonesia. Kementerian Keuangan. 2016. *Kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)*. Jakarta

Republik Indonesia. Direktorat Penelitian dan Pengembangan. 2015. *Laporan Kajian Sistem Pengeolaan Keuangan Desa dan Dana Desa*. Jakarta.

Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.

Peraturan dan Perundang-Undangan :

Kabupaten Kupang. 2015. *Peraturan Bupati No. 07 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015*. Oelamasi

Kabupaten Kupang. 2015. *Peraturan Bupati No. 06 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015*. Oelamasi

Desa Poto. 2016. *Peraturan Desa Poto Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016*. Poto

Desa Poto. 2015. *Peraturan Desa Poto Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015*. Poto

Peraturan Desa Poto Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014

Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Desa*. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. Jakarta

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Jakarta.

Republik Indonesia. 1999. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta